

PERMUKIMAN – PERUMAHAN

2011

UU NO.1, LN 2011/NO.7. TLN. NO.5188 : 89 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

ABSTRAK	: <ul style="list-style-type: none">- Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau dan perlu diganti dengan undang-undang yang baru. - Dasar hukum dari undang-undang ini: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C Ayat (1), Pasal 28H Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (4), Pasal 33 Ayat (3), serta Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) UUD 1945; - Dalam undang-undang ini diatur Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dengan menetapkan ketentuan umum, Asas, tujuan, dan ruang lingkup dari perumahan dan kawasan permukiman; Pembinaan perumahan dan kawasan permukiman; Tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemangunan perumahan dan kawasan permukiman; Penyelenggaraan perumahan; Penyelenggaraan kawasan permukiman; Pemeliharaan dan perbaikan; Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; Penyediaan tanah; Pendanaan dan sistem pembiayaan; Hak dan kewajiban; Peran masyarakat; Larangan; Penyelesaian Sengketa; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; dan keentuan peralihan
CATATAN	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2011;2. Undang-undang ini mencabut UU No. 4 Tahun 1992